

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mandiri

Desa Cibodas merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dahulunya Desa Cibodas merupakan desa tertinggal. Masyarakat Desa Cibodas mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak karena letaknya yang berada di daerah dataran tinggi Kabupaten Bandung Barat. Peta wilayah Desa Cibodas seperti gambar 1.1 sebagai berikut



Gambar 1. 1 Peta Desa Cibodas

Sumber: BUMDes Karya Mandiri Desa Cibodas, 2018

Sejak Tahun 1998 Desa Cibodas adalah salah satu desa yang tidak mempunyai tanah kas desa (bengkok) sehingga tidak memiliki sumber pendapatan asli desa. Untuk menopang keuangan desa, terutama untuk menambah penghasilan aparatur desa ,dan menunjang kebutuhan operasional desa. Oleh karena itu pada tahun 1998 Desa Cibodas melalui musyawarah masyarakat sepakat untuk membangun sebuah badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan air bersih dengan nama Badan Pengelolaan Air Bersih Desa Cibodas (BPAB). Pengadaan air bersih menjadi usaha utamanya ,selain dibutuhkan untuk kehidupan utama masyarakat, juga untuk usaha peternakan dan sumber mata air tersedia walaupun keberadaannya ada di luar wilayah Desa Cibodas. Sumber mata air Desa Cibodas berasal dari beberapa wilayah seperti gambar 1.2 sebagai berikut.

4 SUMBER MATA AIR

1. Sanga Dulang : 9 Km (PTPN VIII)
2. Seke Salada : 7 Km (PTPN VIII)
3. Legok Onah : 4 Km (PERHUTANI)
4. Legok Barong : 5 Km (Milik.PRIBADI)



Gambar 1. 2 Sumber Mata Air BUMDes Karya Mandiri Desa Cibodas

Sumber: BUMDes Karya Mandiri Desa Cibodas, 2018

Pada tahun 2005 BPAB dikukuhkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Karya Mandiri. seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 79 tentang desa. BUMDes Karya Mandiri memiliki beberapa bidang usaha yang bertahan sampai saat ini diantaranya sebagai berikut.

1. Pengelolaan air bersih yang melayani 3.560 KK

Pengadaan air bersih menjadi usaha utama BUMDes Karya Mandiri, selain dibutuhkan untuk kehidupan utama masyarakat, juga untuk usaha peternakan dan sumber mata air tersedia walaupun keberadaannya ada di luar wilayah Desa Cibodas.

2. Sewa kios desa sebanyak 10 unit

BUMDes melakukan terobosan membuat Unit Usaha Sewa Kontrakan Kios, dalam wujud pemberdayaan dan pengembangan perekonomian pedagang.

3. Gedung serba guna sebanyak 1 unit

Unit usaha gedung serba guna dikelola oleh BUMDes Karya Mandiri disewakan kepada masyarakat desa dengan harga yang relatif terjangkau.

4. Agribisnis

Unit usaha agribisnis berupa pengelolaan pertanian dan perkebunan yang hasilnya dapat didistribusikan ke pasar dalam negeri maupun luar negeri.

5. Agen laku pandai BJB

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengurangi ketimpangan ekonomi melalui peningkatan dan pemerataan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

6. E.Warung BNI

E.Warung BNI mampu memperluas usaha yang terkait dengan berbagai sarana pembayaran, seperti listrik, telepon, hingga pulsa. Pembentukan E.Warung BNI merupakan salah satu bagian dari dukungan BNI terhadap

program peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. Pengelolaan pangkalan GAS Elpiji

Pemanfaatan Bumdes sebagai pangkalan gas melon 3 kg membantu masyarakat sekitar mendapatkan gas yang semakin hari semakin langka.

8. Pengelolaan parkir wisata

BUMDes Karya Mandiri mengelola parkir wisata yang ada di sekitar lingkungan Desa Cibodas diantaranya yaitu The Lodge Maribaya, Curug Luhur Cibodas dan Desa Wisata Kampung Pasir Cibodas.

9. Penambahan instalasi baru untuk pertanian dan wisata dalam pengembangan unit pengelolaan air bersih.

Pengelolaan BUMDes Karya Mandiri semakin berkembang seiring adanya dukungan dari pemerintah, seperti diberlakukannya Undang-Undang Desa pada tahun 2014 dan juga bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan aspirasi DPR RI berupa dana operasional. BUMDes Karya Mandiri dikelola oleh masyarakat dengan struktur organisasi seperti gambar 1.3 sebagai berikut.



Gambar 1. 3 Bagan Struktur Organisasi BUMDes Karya Mandiri Desa Cibodas

Sumber: BUMDes Karya Mandiri Desa Cibodas, 2018

Tujuan :

Tujuan pembentukan BUMDes Karya Mandiri adalah untuk memiliki sumber pendapatan asli desa, menopang keuangan desa, menambah penghasilan aparatur desa, menunjang kebutuhan operasional desa, membantu terlaksananya pendidikan bagi masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Cibodas.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Nomor 4 Tahun 2015) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama (PKDSP, 2007). Meskipun pembangunan desa tidak menjadi agenda nasional dalam RPJMN tetapi pemerintah tetap masuk ke desa dengan membawa program pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk penanggulangan kemiskinan (Eko, 2014: 44). Arta Jiwa & Madiarsa (2019) menyatakan bahwa pengembangan wilayah di pedesaan sangat penting, karena struktur ekonomi pedesaan berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan struktur perkotaan. Manan (2019) mengungkapkan bahwa desa merupakan susunan pemerintahan terkecil atau lingkup organisasi yang lebih dekat dengan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam menjalankan otonomi yang telah diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan untuk mensejahterakan masyarakat. Dari sinilah keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dapat ditentukan.

Eko (2014: 269) mengungkapkan bahwa desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera merupakan imajinasi mengenai desa baru yang ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Desa, sebagai arah perubahan desa yang berkelanjutan. Kehadiran Undang-Undang Desa dengan visi besar itu tentu disambut dengan dua sikap yang berbeda oleh masyarakat desa. Sikap yang pertama adalah khawatir dan pesimis. Iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi dapat mendukung kemajuan ekonomi nasional. Kemajuan ekonomi pada tingkat provinsi akan tercapai bila dalam tingkat kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik dan kemajuan ekonomi kabupaten akan tercapai jika didukung dari ekonomi pedesaan yang baik sehingga berpengaruh baik terhadap kesejahteraan masyarakat (Aminy, 2019). Lubis (2017) menyatakan bahwa jika lembaga ekonomi kuat dan didukung oleh kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi ditambah distribusi aset yang merata kepada masyarakat luas harusnya mampu mengatasi berbagai masalah ekonomi di daerah pedesaan.

Untuk mendukung percepatan pembangunan desa, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sebagai upaya mempercepat pembangunan desa, pemerintah menetapkan empat program prioritas. Keempat program tersebut yaitu pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), membangun embung air desa, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan BUMDes adalah salah satu bagian dari empat program prioritas tersebut (Manan, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (PKDSP, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Nomor 39 Tahun 2010) Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes yang merupakan program prioritas, merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya. (Arta Jiwa & Madiarsa, 2019). Sari et al. (2019) mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa harus memiliki kemampuan untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik dan mampu bersaing dengan persaingan yang dinamis. Seperti BUMDes yang bergerak pada bidang jasa keuangan skala kecil dan menengah yang memiliki pesaing seperti koperasi.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipercaya sebagai langkah awal dalam membentuk kemandirian ekonomi desa dan menggerakkan berbagai unit usaha desa (Kasila & Kolopaking, 2018). Menurut Pratiwi et al. (2019) agar keberadaan BUMDes tidak dapat dikuasai oleh pihak tertentu (pemilik modal besar), kepemilikan BUMDes harus dikelola dan dikontrol secara bersama oleh desa dan masyarakat

sehingga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa (Arta Jiwa & Madiarsa, 2019). Alkadafi (dalam Kasila & Kolopaking, 2018) menyatakan dalam penelitiannya ditemukan bahwa BUMDes mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pengolahan potensi desa dan menjadi tulang punggung pemerataan ekonomi masyarakat di Desa Salensen. Karena keberadaan BUMDes dianggap penting karena mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, keberadaan BUMDes semakin meningkat jumlahnya dalam setiap tahun . Alfirdausi (2019) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa, dapat mengurangi angka pengangguran di desa tersebut, BUMDes mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. berikut merupakan grafik perkembangan BUMDes dan peningkatan jumlah BUMDes di seluruh Indonesia.



Gambar 1. 4 Grafik Perkembangan Jumlah BUMDes

Sumber : Kemendesa PDTT, 2018

Dari grafik perkembangan BUMDes diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2018 jumlah BUMDes selalu meningkat pada setiap tahunnya, yang awalnya sejumlah 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 45.549 unit pada tahun 2018, BUMDes meningkat sebanyak 44.527 unit dalam jangka waktu lima tahun. Kemudian pada tahun 2018 sekitar 61% desa telah memiliki BUMDes dan menyerap sebanyak 1.074.754 orang tenaga kerja. Omset BUMDes per tahun sebesar Rp 1,16 Triliyun dengan laba bersih sebanyak Rp 121 Miliar per tahun. Salah satu provinsi yang mendukung pendirian BUMDes sebagai stimulus ekonomi masyarakat desa adalah Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, berikut merupakan jumlah BUMDes yang ada di Jawa Barat.

Tabel 1.1 Jumlah BUMDes Telah Terklarifikasi di Jawa Barat

Kabupaten	Jumlah Desa	BUMDes Sudah Berdiri	BUMDes Mempunyai	BUMDes Mempunyai Unit Usaha
-----------	-------------	----------------------	------------------	-----------------------------

				Peraturan Desa	
		Jumlah	%	Jumlah	Jumlah
1. Bandung	270	199	73,70	199	199
2. Bandung Barat	165	73	44,24	73	73
3. Bekasi	180	-	-	-	-
4. Bogor	416	-	-	-	-
5. Ciamis	258	162	62,79	162	162
6. Cianjur	354	63	17,80	63	63
7. Cirebon	412	137	33,25	137	137
8. Garut	421	219	52,02	219	219
9. Indramayu	309	223	72,17	223	223
10. Karawang	297	297	100,00	297	297
11. Kota Banjar	16	-	-	-	-
12. Kuningan	361	65	18,01	65	65
13. Majalengka	330	-	-	-	-
14. Pangandaran	93	-	-	-	-
15. Purwakarta	183	-	-	-	-
16. Subang	245	-	-	-	-
17. Sukabumi	381	-	-	-	-
18. Sumedang	270	129	47,78	129	129
19. Tasikmalaya	315	260	74,07	260	260
Jumlah / %	5.312	1.827	34,39	18.27	1.827

Sumber: Data Ditjen PPMD, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki 5.312 desa. Dari jumlah desa tersebut yang telah diklarifikasi oleh Ditjen PPMD pada tahun 2017 terdapat sebanyak 1.827 BUMDes. Dari jumlah BUMDes yang telah diklarifikasi tersebut, semua BUMDes telah mempunyai peraturan desa sebagai dasar hukum pembentukan BUMDes.

Berdasarkan data dari Kemendesa (2020) Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 Kecamatan dan 165 Desa beserta BUMDesnya. Kabupaten Bandung Barat memiliki BUMDes yang menjadi percontohan yang terletak di Kecamatan Lembang . Berikut adalah data jumlah BUMDes yang ada di Kecamatan Lembang pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Desa dan BUMDes di Kecamatan Lembang

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes
1	Lembang	Cibodas	Karya Mandiri
2		Cibogo	Mitra Sejahtera
3		Cikahuripan	Assalam CKN
4		Cikidang	Jaya Mandiri

5	Cikole	Seja Bakti
6	Gudang Kahuripan	Gudang Kahuripan
7	Lembang	Lembang
8	Mekar Wangi	Mekar Laksana Jaya
9	Pager Wangi	Pager Wangi
10	Sunten Jaya	Sunten Jaya
11	Wangun Harja	Tirta Cai Hanura
12	Wangun Sari	Jaya Lestari

Sumber: Data yang telah diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Lembang memiliki 12 Desa dan disetiap Desa memiliki BUMDesnya masing-masing. Wilayah lembang memiliki kondisi geografis dan iklim yang mendukung untuk dikembangkan menjadi area destinasi wisata. Beberapa wilayah di daerah ini yang kemudian menjadi objek wisata unggulan antara lain yaitu wisata Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya, Situ Ciburuy dan Jayagiri (Sutrisno, 2016). Salah satu BUMDes yang terdapat di Kecamatan Lembang bisa dikatakan produktif dan potensial dalam pengelolannya sehingga menjadikannya sebagai BUMDes percontohan di Jawa Barat dan Nasional.

BUMDes yang dimaksud adalah BUMDes Karya Mandiri Desa Cibodas. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, didukung oleh Kementerian Desa Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menjadi contoh di tingkat Jawa Barat maupun nasional (Mulyana, 2015). Melalui BUMdes Karya Mandiri, Cibodas dengan pengelolaan air untuk desa, sewa kios dan gedung serba guna. Per bulan, mendapatkan penghasilan berkisar Rp 10 juta, dari tiga pengelolaan usaha tersebut (Wibowo, 2016). Namun dalam pelaksanaannya BUMDes Karya Mandiri masih memiliki beberapa hambatan. Berdasarkan pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juli sampai September tahun 2020 di BUMDes Karya Mandiri, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang. Peneliti melihat bahwa dalam struktural BUMDes mulai dari Ketua BUMDes maupun anggota terkadang melakukan tugas pokok nya secara merangkap, kemudian pemberdayaan dan pelatihan yang difasilitasi baik oleh

perangkat desa maupun pengurus BUMDes belum dilakukan secara masif dan tepat sasaran, dan juga produk-produk BUMDes Karya Mandiri berupa hasil dari perkebunan yang dipasarkan ke luar negeri masih memiliki hambatan dalam regulasinya. Yang terakhir adalah Keberadaan BUMDes belum benar-benar dapat menarik generasi muda sebagai pengelola. BUMDes tidak menarik bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya dalam pengembangan BUMDes di desa, perangkat desa yang tidak mau memakai jasa milenial untuk mengembangkan BUMDes. Salah satunya kendala, sehingga masih sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUMDes mampu menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Bahwa BUMDes adalah harapan yang dapat mereka gunakan guna kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Ketidak tertarik generasi milenial, menjadikan BUMDes masih dikelola dengan logika usaha yang dibangun dan dijalankan dengan model yang konvensional karena dijalankan generasi tua. Seharusnya, generasi muda dan generasi tua saling tersinkronisasi untuk mewujudkan desa mandiri melalui BUMDes.

Pemerintah memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan BUMDes bagi peningkatan ekonomi masyarakat (PKDSP, 2007). Pengembangan basis ekonomi di desa-desa telah diterapkan di masa lalu oleh pemerintah melalui beberapa program. Sayangnya, belum memberikan hasil yang memuaskan (Suriadi et al., 2015). Nasution (dalam Kasila & Kolopaking, 2018) menyatakan bahwa prasyarat utama keberhasilan program pembangunan di pedesaan yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan dalam hal ini jika dikaitkan dengan BUMDes artinya partisipasi masyarakat dalam pembentukan hingga pelaksanaan BUMDes. Menurut Yeung & McGee (dalam Wihardjo, 2016) mengungkapkan bahwa partisipasi menggambarkan adanya peran dari individu atau kelompok dalam suatu kegiatan bagi kepentingan bersama.

Unsur masyarakat yang seharusnya dapat ikut berpartisipasi dalam pembentukan dan pelaksanaan BUMDes adalah pemuda, yang akan menjadi penerus

bagi bangsa. pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun (Rencana Strategis KEMENPORA, 2017). Pemuda ibarat tulang punggung bangsa, penentu masa depan bangsa, bahkan pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan kemerdekaan bangsa. Untuk itu, pembangunan dalam bidang kepemudaan harus mampu menciptakan pemuda berkarakter, maju, dan mandiri (Statistik Pemuda Indonesia, 2018). Rencana Strategis KEMENPORA (2017) mengungkapkan bahwa pada tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas.

Menurut hasil Susenas Tahun 2018, Indonesia adalah rumah bagi 63,82 juta jiwa pemuda, jumlah tersebut merupakan seperempat dari total penduduk Indonesia. Pemuda laki-laki lebih banyak daripada pemuda perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,36, yang berarti setiap 102 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan. Saat ini, diperkirakan sekitar 63,82 juta jiwa pemuda yang tersebar dari barat sampai timur wilayah Indonesia dan mengisi hampir seperempat penduduk Indonesia (24,15 persen). Meskipun mereka tidak mendominasi proporsi penduduk Indonesia, pada kenyataannya 63 juta penduduk bukanlah jumlah yang kecil. Akan sangat berarti jika jumlah yang tidak sedikit ini diiringi dengan kualitas yang mumpuni, mengingat mereka adalah calon pemimpin yang akan menentukan nasib bangsa ini di masa yang akan datang. Persentase penduduk Indonesia menurut kelompok umur dapat dilihat sebagai berikut.

Karakteristik Demografi	<16 tahun	16-30 tahun	>30 tahun	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	28,53	24,15	47,31	100,00
Tipe Daerah				
Perkotaan	27,66	25,03	47,31	100,00
Perdesaan	29,58	23,10	47,32	100,00
Jenis Kelamin				
Laki-laki	29,09	24,32	46,59	100,00
Perempuan	27,96	23,99	48,05	100,00

Gambar 1. 5 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur

Sumber: BPS Susenas Maret, 2018

Berdasarkan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015, pemuda juga mengisi sekitar sepertiga dari penduduk usia produktif yang keberadaannya diharapkan mampu menggerakkan perekonomian negeri ini. Melihat fakta tersebut, sudah selayaknya pemuda Indonesia mampu berperan lebih sesuai dengan kualitas yang dimiliki, sehingga peran pemuda sebagai katalisator pembangunan semakin terlihat nyata (BPS Susenas, 2018). Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan (Rencana Strategis KEMENPORA, 2017). Persentase Pemuda Indonesia dari tahun ke tahun sebagai berikut.



Gambar 1. 6 Persentase Pemuda Dari Tahun 2010 – 2018

Sumber: BPS, Susenas Maret, 2018

Pemuda menjadi salah satu unsur masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam keterlibatan dan perannya, seperti dalam pengelolaan BUMDes pemuda bisa saja ikut berperan aktif dengan kualitas, kapasitas, kreativitas dan inovasi yang dimiliki turut membantu kemajuan BUMDes tertentu. Hasil penelitian terdahulu oleh Kasila & Kolopaking (2018) menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemuda Desa Ponggok dalam BUMDes Tirta Mandiri memiliki hubungan kuat dengan tingkat perkembangan usaha dalam BUMDes “Tirta Mandiri”. Karena pemuda yang terlibat dalam BUMDes juga terlibat dalam meningkatkan kekuatan kelembagaan BUMDes, terlibat dalam peningkatan kapasitas anggota BUMDes, dan juga terlibat dalam memperluas pemasaran dari produk usaha BUMDes.

Dengan adanya pengaruh signifikan dari partisipasi pemuda desa yang dapat meningkatkan usaha BUMDes pada penelitian terdahulu, serta BUMDes Karya Mandiri yang mampu mengelola sumber daya yang ada sehingga menjadi BUMDes percontohan Nasional dan Jawa Barat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Pemuda Desa Terhadap Perkembangan Bumdes Karya Mandiri Desa Cibodas”**.

1.3 Perumusan Masalah

Dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan menyatakan bahwa dalam mewujudkan pembangunan nasional diperlukan seorang pemuda yang mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Berdasarkan hal tersebut, maka dirasa pemuda sangat diperlukan dalam pembangunan desa, khususnya dalam pembangunan BUMDes. Salah satu BUMDes yang dapat dikatakan berhasil dalam pengelolaan dan keberlanjutan usahanya adalah BUMDes Karya Mandiri Desa Cibodas. Keberlangsungan pengelolaan BUMDes dapat dikatakan berjalan dengan baik karena dari awal pendiriannya tahun 1998 sampai sekarang masih tetap bertahan. BUMDes Karya Mandiri memiliki beberapa program usaha, seperti yang paling menonjol dan menjadi ciri khasnya yaitu pengelolaan air bersih yang dapat melayani 3.560 KK dan sektor agribisnis yang didukung oleh letak geografis berada di dataran

tinggi. Produk-produk pertanian dari Desa Cibodas dipasarkan ke supermarket dan ekspor ke negara lain. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan BUMDes adalah keberadaan pemuda yang memiliki ide-ide kreatif dan inovatif. Jumlah pemuda Desa Cibodas sebanyak 339 orang dengan usia 16-30 orang dari 17 RW. BUMDes Karya Mandiri mampu melakukan regenerasi agar usaha BUMDes dapat berjalan. Pemuda Desa Cibodas menjadi harapan bagi keberlangsungan usaha BUMDes kedepannya. Disisi lain keberhasilannya BUMDes Karya Mandiri juga memiliki permasalahan yang dihadapi. Pertama yaitu pemuda Desa Cibodas masih banyak yang kurang aktif dan kurang peduli terhadap kegiatan desa, bukanlah sesuatu yang terlalu dibutuhkan karena pemuda Desa Cibodas yang tidak ikut terlibat beralasan memiliki kesibukan pekerjaan, ketidaktertarikan akan hal tersebut dan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah para pemuda desa Cibodas tidak jarang menganggap bahwa BUMDes dalam pengelolaannya identik dengan orang-orang tua sehingga terkesan pemuda desa enggan untuk ikut terlibat didalamnya, begitu pula sebaliknya BUMDes masih kurang dalam memanfaatkan potensi-potensi kreativitas yang ada pada Pemuda Desa Cibodas. Kemudian yang terakhir yaitu dalam hal perkembangan BUMDes seperti penguatan produk pemasaran, sebagai contoh produk pertanian BUMDes Karya Mandiri yang sudah dapat didistribusikan ke luar negeri, banyak proses ekspor yang dipersulit, banyak pungutan yang menambah biaya ekspor dan regulasi yang sulit sehingga membuat ekspor produk pertanian BUMDes Karya Mandiri tidak konsisten.

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Seberapa besar pengaruh *Individual Creativity* terhadap Tingkat Partisipasi Pemuda dalam BUMDes Karya Mandiri?
2. Seberapa besar pengaruh *Perceived Organizational Support* terhadap Tingkat Partisipasi Pemuda dalam BUMDes Karya Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh Tingkat Partisipasi Pemuda terhadap Perkembangan BUMDes Karya Mandiri?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi fenomena pada bagian perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh *Individual Creativity* terhadap Tingkat Partisipasi Pemuda dalam BUMDes Karya Mandiri.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh *Perceived Organizational Support* terhadap Tingkat Partisipasi Pemuda dalam BUMDes Karya Mandiri.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh Tingkat Partisipasi Pemuda terhadap Perkembangan BUMDes Karya Mandiri.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

a. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai peran Pemuda Desa Cibodas beserta masyarakat dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa, informasi tentang bagaimana peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes secara efektif.

b. Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai BUMDes. Terutama mengenai partisipasi pemuda dalam pengelolaannya.

1.6.2 Aspek Praktis

a. Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bahan ajar untuk mahasiswa Universitas Telkom dalam kerangka mata kuliah *entrepreneurship*.

b. Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama Pemerintah Desa Cibodas yang berperan sebagai pengawas dan pemangku kepentingan utama dalam menjalankan program BUMDes terkait efektivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk kesadaran dan keterlibatan Pemuda Desa Cibodas dalam mengembangkan potensi desa lewat BUMDes guna mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang mandiri.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat menemukan kesenjangan penelitian dan menentukan posisi penelitiannya. Dalam bab ini juga membahas proses pembentukan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, situasi sosial, pengumpulan data beserta sumber data, validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan mengenai karakteristik responden dan hasil penelitian. Data tersebut dianalisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan usulan saran dalam aspek akademis dan praktis.